

Modul 3:

Tata Kelola Internet





Bab 1:

Perkenalan Tata Kelola Internet

I. Internet dan Dampaknya

Kehadiran Internet “mengguncang” dunia. Di awal-awal perkembangan Internet (sekitar tahun 1970 – 1980an), Internet adalah milik kaum cerdik cendekia dan teknis. Tidak banyak orang yang tertarik untuk mengatur tata kelola Internet, termasuk pemerintah. Ketika Internet mulai mempengaruhi banyak dimensi kehidupan, maka tata kelola Internet mulai diperhatikan.

Sampai saat ini, standard teknis Internet agar bisa terus berevolusi diatur oleh kelompok teknis yaitu IETF (Internet Engineering Task Force) yang terdiri dari network designers, periset, vendor dan operator Internet.

II. Apa arti dari Tata Kelola Internet?

Internet

Beberapa orang menganggap kata “Internet” tidak cukup menjelaskan semua aspek perkembangan digital yang terjadi. Ada istilah lain seperti masyarakat informasi (information society) dan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) biasanya digunakan karena lebih lengkap dan bisa mencakup lebih dari sekedar Internet. Tetapi, dalam perkembangannya, karena Internet Protocol (IP) sudah menggeser banyak standar proses komunikasi dan juga menawarkan banyak layanan yang tidak terhingga, maka dalam konteks ini dan tepatnya modul ini, maka terminologi “Internet” menjadi relevan.

Tata Kelola (Governance)

Awalnya, terminologi *governance* (terjemahan bahasa Indonesia yang umum adalah tata kelola) banyak yang menolak. Karena dianggap sangat dekat dengan istilah government (pemerintah). Belum lagi apabila istilah ini diterjemahkan ke bahasa lain misalnya Spanyol. Di Spanyol, istilah *governance* diartikan semata kegiatan pemerintah.

Tapi lama kelamaan, terminologi *governance* diterima secara umum karena dalam banyak konteks mampu menjelas kompleksitas pengelolaan Internet.

Definisi Tata Kelola Internet (working definition/ definisi umum, dibuat di World Summit on the Information Society, lihat bagian WSIS)

Adalah: pembangunan dan penerapan prinsip, norma, aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan program yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet secara bersama-sama, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing.



III. Evolusi Tata Kelola Internet

Awal Tata Kelola Internet (1970 – 1994)

Internet awalnya adalah proyek Pemerintah Amerika Serikat. Akhir tahun 1960, diawali dari proyek *Defense Advance Research Project Agency Network* (DARPA Net) dan kemudian pertengahan tahun 1970 diperkenalkan dengan TCP/IP (Transmissions Control Protocol/ Internet Protocol), jaringan ini kemudian berkembang menjadi Internet seperti sekarang.

Teknologi ini menggunakan prinsip yang terdesentralisasi. Paket data bisa dijalankan melalui beragam jalan tanpa halangan formal dan saat itu tidak ada campur tangan negara/pemerintah didalamnya.

Prinsip Internet ini juga dijalankan dalam proses tata kelolanya. Entitas yang melakukan tata kelola (teknis) Internet ada di the Internet Engineering Task Force (IETF). Prinsipnya adalah kerjasama yang sejajar, pengambilan keputusan melalui konsensus dan mengikutsertakan banyak orang (rata-rata orang teknis, bukan orang pemerintah).

Perang DNS (1994 – 1998)

Pendekatan Internet yang terdesentralisasi menjadi berubah ketika Pemerintah dan sektor bisnis mulai mengidentifikasi posisinya yang strategis. Tahun 1994, US National Science Foundation (Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat), entitas yang waktu itu mengelola Internet, memberikan wewenang (sub-kontrak) Domain Name System/ Sistem Nama Domain, kepada perusahaan Amerika yang bernama Network Solutions Inc (NSI). Proses ini ditentang oleh banyak organisasi internasional dan juga banyak negara. Kejadian ini disebut sebagai Perang DNS.

Jalan tengahnya, dibentuklah organisasi di bawah pemerintah Amerika Serikat bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

World Summit on Information Society (2003 – 2005)

World Summit on the Information Society (WSIS) yang diselenggarakan di Jenewa (tahun 2003) dan dilanjutkan di Tunisia (tahun 2005) secara resmi mendudukkan tata kelola Internet ke dalam agenda diplomatik Persatuan Bangsa Bangsa.

Di WSIS inilah tata kelola Internet (*Internet Governance*) dibahas dan dielaborasi. Kemudian diputuskan bahwa dibentuk Internet Governance Forum (IGF)/ Forum Tata Kelola Internet untuk kemudian dilaksanakan Persatuan Bangsa-Bangsa.

Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan IGF ke 8 tahun 2013 dan diadakan di Bali.

2006

Setelah pertemuan di Tunisia, ada dua perkembangan utama dan peristiwa penting yang menandai perdebatan tata kelola Internet dimulai.

Pertama, Nota Kesepahaman (MoU) antara ICANN (lihat: perang DNS) dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. MoU ini diharapkan bisa membuat pengaruh Amerika Serikat semakin sedikit terhadap perkembangan Internet. Diharapkan di masa depan ICANN menjadi lembaga internasional yang independen (lihat: studi kasus).

Kedua, pertemuan Internet Governance Forum (IGF) pertama di Athena, Yunani. Forum ini adalah pertemuan pertama dan eksperimen pertama multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk) dijalankan. Forum ini adalah eksperimen diplomasi multilateral pertama yang tidak beranggotakan negara (state members).

2009

Diskusi ICANN yang berfokus pada domain .xxx (materi khusus dewasa), telah membuka perdebatan terkait tata kelola Internet dan wewenang ICANN. Apakah ICANN hanya menangani masalah teknis atau juga terkait dengan kebijakan publik?

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat melakukan intervensi pada proses di ICANN dan menelurkan pertanyaan soal wewenang negara (dalam hal ini pemerintah) terkait tata kelola Internet.

2008

Debat terkait netralitas jaringan muncul ke permukaan. Obama, yang saat itu sudah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (2008) termasuk pengusung netralitas jaringan. Saat melakukan kampanye, Obama banyak menggunakan perangkat Internet dan web 2.0 secara intensif.

Netralitas jaringan adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua lalu lintas data harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi (baik data dari perusahaan kecil dan besar). Beberapa pendukung netralitas jaringan saat itu (diantaranya Google) juga menjadi bagian dari tim kampanye Obama. Sementara itu, ada juga perusahaan seperti AT&T dan Verizon yang tidak ingin menjalankan netralitas jaringan. Debat netralitas jaringan di saat ini sangat berkonteks Amerika.

Media social seperti Facebook sudah mulai terkenal dan memunculkan debat (terutama di Amerika) terkait perlindungan data pribadi.

2010

Isu utama terkait tata kelola Internet adalah semakin pentingnya peran jejaring sosial seperti facebook dan twitter dan perlindungan data pribadi pengguna.

Isu lainnya adalah terkait geo-politik Internet. Ditandai dengan pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilary Clinton, tentang kebebasan berekspresi di Internet, terutama terkait dengan yang terjadi di Cina. Di tahun ini, Google dan Cina berseteru soal pembatasan akses pencari Google di Cina yang berujung pada penutupan Google oleh Beijing.

Di tahun ini, ICANN juga memulai penggunaan nama domain non huruf latin seperti Arab dan Cina.

2011

Tata Kelola Internet makin menjadi bagan dari diplomasi tingkat tinggi. Salah satu konsekuensinya adalah pergeseran kementerian yang terlibat dalam politik sebuah negara. Awalnya tata kelola Internet berada di isu teknis seperti teknologi (IT, telecom), tapi bergeser ke kementerian yang lebih politis. Media global seperti the Economist, Al Jazeera juga BBC mulai mengikuti perkembangan diskusi tata kelola Internet lebih intensif.



Diskusi ini menjadi lebih politis karena terbawa oleh Arab Spring. Diakui (oleh banyak orang, tapi bukan semua orang) bahwa salah satu hasil dari Arab Spring adalah media social menjadi salah satu alat yang sangat strategis dalam proses politik sebuah negara.

Perkembangan lain yang juga menarik adalah ICANN memulai proses reformasi manajemen internalnya. Chief Executive Office (CEO) ICANN mengundurkan diri.

2012

Ada dua hal utama di tahun ini.

Pertama, Fadi Chehade, CEO ICANN yang baru membawa nafas yang baru karena mengedepankan peran *multi-stakeholder* (pemangku kepentingan majemuk) dalam proses ICANN. Hal ini menunjukkan bahwa Internet "menggoyang" kepentingan negara (dalam hal ini pemerintah)

karena pemerintah duduk bersama dengan masyarakat sipil, kelompok teknis dan kelompok bisnis.

Kedua, perdebatan hangat terjadi di the *World Conference on International Telecommunications* yang tujuannya untuk melakukan amandemen ITU (*International Telecommunication Union*) – terkait Kebijakan Telekomunikasi Internasional. Ada pertanyaan besar terkait apakah potensi dampak kebijakan telekomunikasi Internasional terhadap perkembangan Internet di dunia. Setelah proses konferensi yang melelahkan selama dua minggu, para peserta belum bisa mendapatkan keputusan. Ada dua negara yang terbelah, negara barat yang sepakat dengan proses tata kelola multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk) dan negara yang sepakat agar Pemerintah lebih berada di depan seperti Cina, Rusia dan Arab.

2013

Tahun ini digemparkan oleh pernyataan Edward Snowden terkait beragam surveillance program yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat melalui US National Security Agency. Orang menjadi makin tertarik untuk ikut dalam perdebatan tata kelola Internet terutama terkait dengan proteksi data pribadi dan hak atas kebebasan pribadi (*privacy*).



IV. Studi Kasus:

Silakan pelajari kasus transisi IANA¹/ICANN dari awalnya berada di bawah Department of Commerce US (Departemen Perdagangan di Amerika) menjadi entitas internasional yang tidak berada di bawah kendali sebuah negara.

¹ IANA adalah institusi yang mengurus Top Level Domain (TLD), alamat Internet protocol dan hal yang terkait dibawahnya. ICANN, berdasarkan Memorandum of Understanding dengan Pemerintah Amerika adalah institusi yang menjalankan IANA.

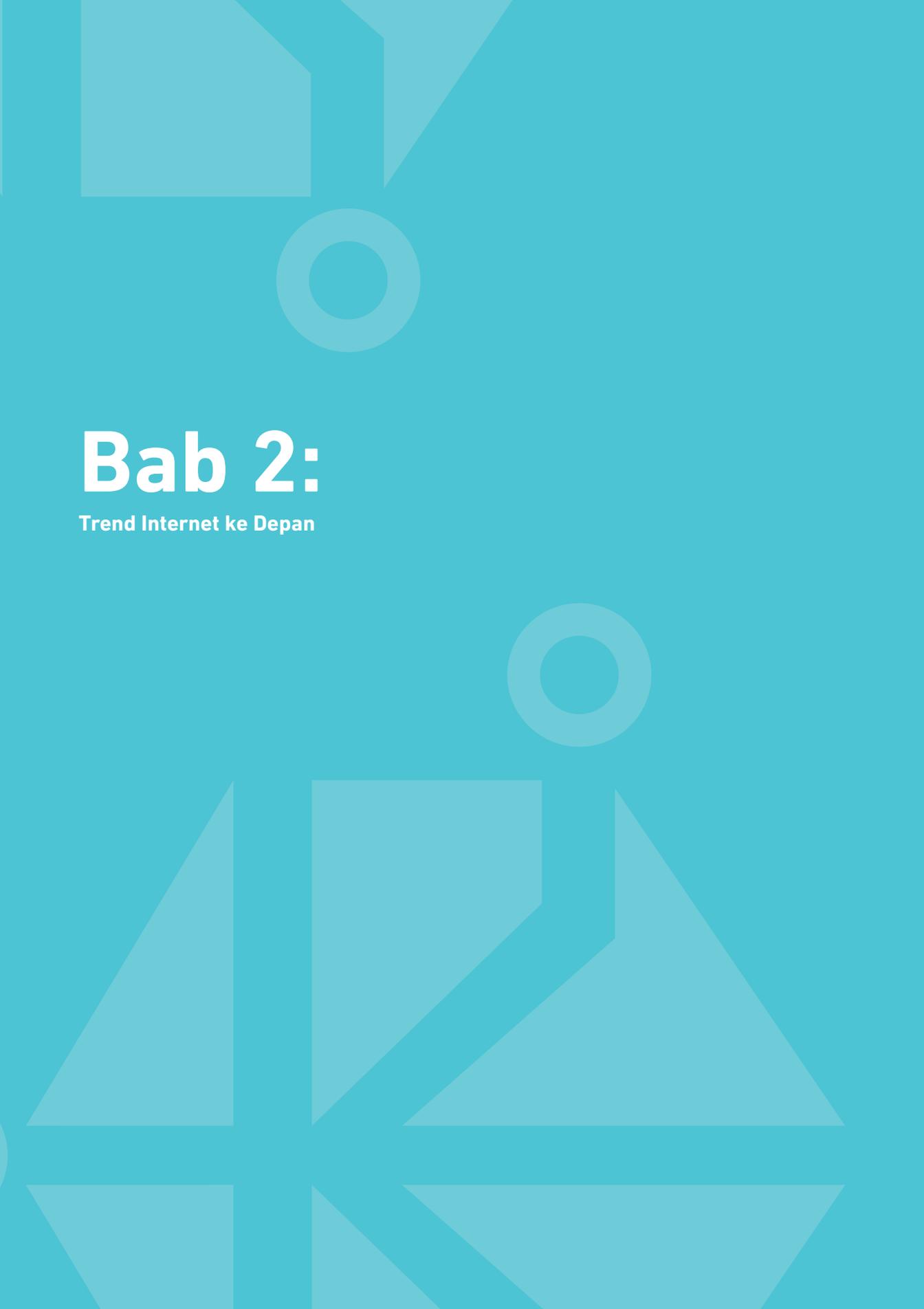
Studi kasus ini menjadi salah satu contoh pergesekan dari tata kelola Internet.

Bahan utama ada di:

- Press release Departmen Perdagangan Amerika: <https://www.ntia.doc.gov/press-release/2016/iana-stewardship-transition-proposal-meets-criteria-complete-privatization>
- Fact-sheet terkait proses transisi IANA/ ICANN <https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2016/fact-sheet-ntias-assessment-iana-stewardship-transition-proposal>

V. Daftar Istilah

IANA	: Internet Assigned Numbers Authority
ICANN	: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
TCP/ IP	: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
DNS	: Domain Name System



Bab 2:

Trend Internet ke Depan

Trend Internet ke Depan

Tata Kelola Internet merupakan isu yang sedang berkembang dan penting untuk didiskusikan. Beberapa trend ke depan yang berkaitan dengan tata kelola internet adalah:

1. Internet of things
2. Akuntabilitas
3. Cyber crime, terorisme, dan bisnis keamanan

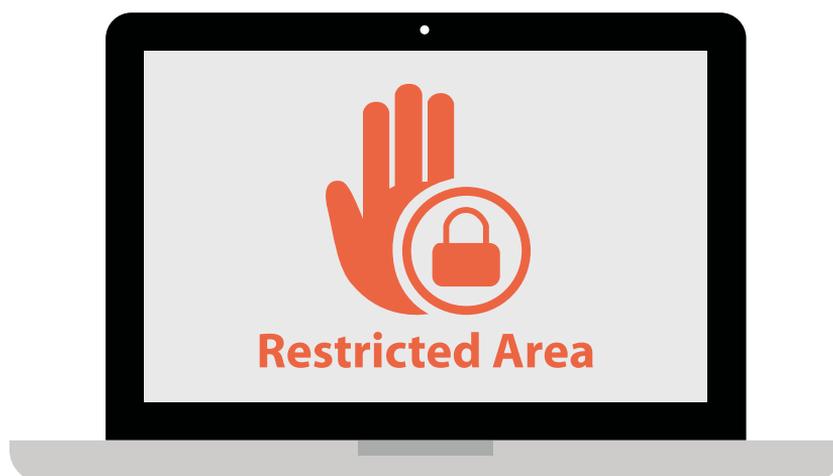
Internet of things menjadi kekhawatiran banyak orang, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pengalaman dalam isu internet menggunakan internet untuk mengambil data pribadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas (contoh: aplikasi yang menggunakan data-data pribadi untuk diolah dan ditampilkan tanpa persetujuan pengguna aplikasi)

Akuntabilitas perusahaan berbasis internet. Pemerintah dan sektor bisnis memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan posisi mereka dalam tata kelola internet. Hal ini tentu akan mempengaruhi penggunaan internet oleh civil society. Di IGF banyak sekali mendapat proposal untuk membicarakan akuntabilitas perusahaan berbasis internet dan memang seharusnya civil society ikut mengkritisi akuntabilitas perusahaan dan pemerintah dalam hal pengaturan dan penggunaan internet.

Cyber crime, terorisme, dan bisnis keamanan: internet dipakai untuk menggalang dukungan untuk ISIS, data pribadi dihack dalam situs perselingkuhan.

Fragmentasi Internet

Fragmentasi Internet maksudnya adalah pengaturan internet yang ingin disesuaikan dengan peraturan negara, contohnya China yang membatasi penggunaan internet bagi warganya (tidak bisa menggunakan Facebook dan kebijakan pemerintah lainnya). Hal ini tentu bertolak belakang dengan makna internet itu sendiri: kebebasan. **Jika ada pembatasan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya baik di negara yang sama maupun di negara yang berbeda,**



maka hal tersebut bukanlah internet. Hal ini menghilangkan sisi inovasi dan kontribusi seseorang dalam pemanfaatan internet. Ini menjadi trend ke depan dan banyak orang yang khawatir terhadap perkembangan trend ini dimana kebebasan penggunaan internet akan dibatasi oleh pemerintah.





kemudi